

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kinerja keuangan

1. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan usaha yang dilakukan setiap perusahaan dalam mengukur dan menilai setiap keberhasilan yang dicapai dalam menghasilkan laba, sehingga perusahaan dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang telah dicapai pada perusahaan. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut penjelasan mengenai kinerja keuangan,

“Menurut Prastowo yang dikutip oleh Putri Hidayatul Fajrin (2016) menyebutkan unsur dari kinerja keuangan perusahaan adalah unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran kinerja perusahaan yang disajikan pada laporan laba rugi, penghasilan bersih sering kali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran lainnya”.

Menurut Fidhayatin (2012:205) “Perusahaan yang sehat nantinya akan dapat memberikan laba bagi para pemilik modal, perusahaan yang sehat juga dapat membayar hutang dengan tepat waktu”. Selain itu, kinerja keuangan dari suatu perusahaan yang telah dicapai dalam satu tahun atau satu periode waktu, adalah gambaran sehat atau tidaknya keadaan suatu perusahaan.

Menurut Fahmi (2012:2) yang dikutip oleh Marsel Pongoh (2013) menyatakan kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan dengan baik dan benar. Seperti dengan

membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standart dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan).

Menurut Hery (2015) kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk mengevaluasi efesiensi dan efektifas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan dikatakan berhasil apabila perusahaan telah mencapai suatu kinerja tertentu yang telah ditetapkan.

Isna (2015:78) kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang sangat penting dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah secara baik agar dapat memperhatikan efektivitas, efesiensi dan ekonomis

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan hasil kerja atau perbandingan secara kualitas dan kuantitas baik yang bersifat fisik atau mental, fisik atau non mental, gambaran kondisi keuangan perusahaan baik menyangkut penghimpunan dan penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi dalam meningkatkan perusahaan

2. Manfaat Kinerja Keuangan

Menurut Prayitno (2010:9) penilaian kinerja dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Manfaat dari penilaian kinerja bagi manajemen adalah untuk:

- a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotifan karyawan secara maksimal.
 - b. Membantu pengembalian keputusan yang berhubungan dengan karyawan seperti promosi, transfer dan pemberhentian
 - c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan menyediakan kriteria promosi dan evaluasi program pelatihan karyawan
 - d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan bagaimana atasan menilai kinerja karyawan.
 - e. Menyediakan suatu dasar dengan distribusi penghargaan.
3. Menurut Munawir (2017:23) tujuan kinerja keuangan

Tujuan kinerja keuangan merupakan Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar atau melunasi setiap hutang dan beban bunga tepat pada waktunya.

Menurut Munawir (2017:23) tujuan dari penilaian suatu perusahaan adalah:

- a. Untuk mengetahui tingkat likuiditas suatu perusahaan yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban saat ditagih
- b. Untuk mengetahui tingkat leverage suatu perusahaan yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan bila perusahaan terkena likuidasi baik jangka panjang atau jangka pendek
- c. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba selama periode tertentu.
- d. Untuk mengetahui stabilitas usaha perusahaan yaitu kemampuan untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan pertimbangan kemampuan perusahaan membayar beban bunga atas hutangnya termasuk kemampuan perusahaan membayar deviden secara teratur kepada pemegang saham tanpa mengalami hambatan.

4. Faktor-Faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan yang dalam perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Current Ratio (CR) dan Net Profit Margin (NPM),

Current Ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo saat ditagih secara keseluruhan.

Struktur modal menurut Riyanto (2013 : 296) adalah “perimbangan atau perbandingan antara jumlah hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Hutang jangka panjang merupakan salah satu dari bentuk pembiayaan jangka panjang yang memiliki jatuh tempo lebih dari satu tahun”.

Sawir (2001 : 18) mengemukakan bahwa “Net Profit Margin dirumuskan dengan laba bersih dibagi dengan penjualan, rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan”.

5. Alat ukur Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio. Analisis rasio dapat menyingkap hubungan sekaligus menjadi dasar perbandingan yang menunjukkan kondisi atau kecenderungan yang tidak dapat dideteksi bila hanya melihat komponen-komponen rasio itu sendiri.

Menurut Jumingan (2006:242) Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis berdasarkan tehniknya analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 8 macam yaitu

- a. Analisis perbandingan laporan keuangan merupakan tehnik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan baik dalam jumlah (absolute) maupun dalam persentase (relative)
- b. Analisis Trend merupakan tehnik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.
- c. Analisis persentase per komponen merupakan tehnik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun hutang
- d. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan tehnik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan.
- e. Analisis sumber dan penggunaan kas, merupakan tehnik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu.
- f. Analisis rasio keuangan merupakan tehnik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan diantara pos-pos tertentu dalam neraca maupun dalam laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simulatan.
- g. Analisis perubahan laba kotor merupakan tehnik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebabnya terjadinya perubahan laba
- h. Analisis break even merupakan tehnik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

Menurut Dwi Prastowo (2011:80) ada lima tehnik analisis yang dapat digunakan

- a. Likuiditas yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.
- b. Solvabilitas (struktur modal) yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang atau mengukur tingkat proteksi kreditor jangka panjang.
- c. Return ON Investment yang mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan
- d. Pemanfaatan aktiva yang mengukur efesiensi dan efektivitas pemanfaatan setiap aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.
- e. Kinerja operasi yang mengukur efesiensi operasi perusahaan.
- f. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah rasio likuiditas dan rasio profitabilitas.
- g. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban financial yang berjangka pendek tepat pada waktunya.

- h. Rasio profitabilitas adalah rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba baik dalam hubungan dengan penjualan asset maupun modal sendiri.

Beberapa macam rasio kinerja keuangan yaitu :

- 1) Rasio Likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. dengan kata lain rasio likuiditas adalah untuk mengukur sampai seberapa jauh tingkat kemampuan perusahaan untuk mengukur sampai seberapa jauh tingkat kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo. Dalam penelitian ini terhadap rasio likuiditas didasarkan pada dua rasio yaitu

- 1) *Current ratio*

Current ratio merupakan salah satu Rasio Likuiditas yang digunakan untuk menilai posisi likuiditas suatu entitas dengan menggunakan hubungan antara aktiva lancar dan liabilitas lancar Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\mathbf{Current\ Ratio} = \frac{\mathbf{Aktiva\ lancar}}{\mathbf{Utang\ lancar}} \times 100\%$$

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegunaan *current ratio* dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya seperti hutang dan upah. Ini dihitung dengan membagi asset lancar dengan kewajiban lancar .

2) *Quick Ratio*

Quick Ratio merupakan perbandingan antara aktiva lancar dikurang persediaan utang lancar apabila menggunakan *Quick Ratio* untuk menentukan tingkat Likuiditas maka secara umum dapatlah dikatakan bahwa suatu perusahaan yang mempunyai *Quick Ratio* kurang dari 1:1 atau 100% dianggap kurang baik tingkat Likuiditasnya. Rasio ini dapat dirumudkan sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{aktiva lancar} - \text{persediaan}}{\text{utang lancar}} \times 100\%$$

Dengan demikian dapat dikatakan kegunaan rasio ini adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek. Biasanya pemenuhan kewajiban jangka pendek dilakukan dengan menggunakan asset berwujud.

2) Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas adalah rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba, baik dalam hubungan dengan penjualan, asset maupun modal sendiri.

Jika perusahaan mampu menghasilkan laba terhadap penjualan dan investasi perusahaan maka perusahaan dinilai sebagai perusahaan yang efisien. Sebaliknya jika perusahaan tidak mampu menghasilkan

laba terhadap penjualan dan investasi perusahaan maka perusahaan dinilai sebagai perusahaan yang tidak efisien.

Rasio Profitabilitas terdiri dari:

1) *Gross Profit Margin*(*Margin Laba Kotor*)

merupakan rasio perbandingan antara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan bersih. *Gross profit margin* merupakan rasio yang mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya yang mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk memproduksi secara efisien. Semakin tinggi gross profit margin maka semakin baik keadaan operasi perusahaan karena hal ini menunjukkan bahwa harga pokok penjualan relative lebih rendah dibandingkan dengan penjualan dan sebaliknya semakin rendah *gross profit margin* maka semakin buruk keadaan operasi perusahaan dan hal ini menunjukkan bahwa harga pokok penjualan lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan. Rasio atau pedoman yang baik adalah >20%. Rumus :

Gross Profit Margin

$$= \frac{\text{penjualan bersih} - \text{harga pokok penjualan}}{\text{penjualan bersih}} \times 100\%$$

2) *Net Profit Margin*(*Margin Laba Kotor*)

Merupakan rasio perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. *Net Profit Margin* adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak. Semakin

tinggi *Net Profit Margin* maka semakin baik kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu sehingga perusahaan dinilai sebagai perusahaan yang efisien. Sebaliknya jika semakin rendah maka semakin buruk kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan sehingga perusahaan cenderung dinilai tidak efisien. Rasio atau pedoman yang baik adalah >5%

rumus:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{penjualan bersih}} \times 100\%$$

3) *Return On Assets (tingkat pengembalian asset)*

merupakan rasio perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. *return on asset* sering juga disebut *return on investment*, karena *return on asset* ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan asset perusahaan yang diamankan. Semakin tinggi *return on asset* maka semakin baik total aktiva yang dipergunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan sehingga kondisi ini efisien bagi perusahaan. Sebaliknya, semakin rendah *return on asset* maka semakin buruk total aktiva yang dipergunakan untuk operasi

perusahaan tidak memberikan laba bagi perusahaan sehingga kondisi ini tidak efisien bagi perusahaan. rasio atau pedoman yang baik adalah >5%.

Rumus:

$$\text{return on assets} = \frac{\text{labu bersih setelah pajak}}{\text{total aktiva}} \times 100\%$$

4) *Return On Equity (tingkat pengembalian atas total modal sendiri)*

merupakan rasio perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total modal sendiri. *Return on equity* adalah suatu perhitungan yang sangat penting pada suatu perusahaan yang memperlihatkan suatu *return on equity* yang tinggi yang mengindikasikan:

- (1) perusahaan mempunyai suatu keunggulan yang tahan lama dalam persaingan.
- (2) investasi dalam bentuk modal para pemegang saham akan tumbuh pada suatu tingkat pertumbuhan tahunan yang tinggi sehingga akan mengarahkan kepada suatu harga saham yang tinggi di masa depan. Semakin tinggi *return on equity* maka semakin baik laba yang dihasilkan dan semakin banyak investor untuk menanamkan investasinya di perusahaan tersebut sehingga perusahaan dinilai sebagai perusahaan yang efisien. Dan sebaliknya jika semakin rendah *return on equity* maka semakin

buruk laba yang dihasilkan semakin sedikit investor menanamkan investasinya ke perusahaan tersebut bahkan tidak menutup kemungkinan investor tidak mau menanamkan investasinya di perusahaan tersebut sehingga perusahaan dinilai sebagai perusahaan yang tidak efisien. Rasio atau pedoman yang baik adalah >20%

Rumus:

$$\text{return on equity} = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{total modal sendiri}} \times 100\%$$

5) Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi. Perusahaan yang mempunyai aktiva /kekayaan yang cukup untuk membayar hutang-hutangnya disebut perusahaan yang solvable sedang yang tidak disebut insolvable belum tentu likuid. Macam-macam rasio keuangan berkaitan dengan rasio solvabilitas yang biasa digunakan adalah

a) *Total Debt to Assets Ratio*

Rasio yang biasa disebut dengan rasio hutang ini mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari hutang. Hutang yang dimaksud adalah semua hutang yang dimiliki oleh perusahaan baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Kreditor lebih menyukai debt ratio yang

rendah sebab tingkat keamanan dananya menjadi semakin baik. untuk mengukur besarnya rasio hutang digunakan rumus :

$$\text{Total Debt to Total Assets Ratio} = \frac{\text{total hutang}}{\text{total aktiva}} \times 100\%$$

Rasio ini menunjukkan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva. Semakin kecil rasionya semakin aman (solvable) porsi hutang terhadap aktiva harus lebih kecil.

b) Debt to Equity Ratio

Rasio hutang dengan modal sendiri (debt to equity ratio) adalah imbalan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan hutangnya. Bagi perusahaan sebaiknya besarnya hutang tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Semakin kecil rasio ini semakin baik artinya semakin kecil porsi hutang terhadap modal semakin aman. Rumus:

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{total hutang}}{\text{total modal}} \times 100\%$$

6) Rasio Rentabilitas

Rasio rentabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba. Ditekankan pada rasio ini karena berkaitan erat dengan

kelangsungan hidup perusahaan. Ada beberapa ukurn rasio rentabilitas yang di pakai

a) *Profit Margin*

Rasio ini menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa dilihat langsung pada analisis *common size* untuk laporan laba rugi. Rasio ini bisa diinterpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan pada periode tertentu, rasio profit margin bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\textit{Profit Margin} = \frac{\textit{laba bersih}}{\textit{penjualan}} \times 100\%$$

b) *Gross Profit Margin*

Gross profit margin merupakan perbandingan antara laba kotor yang diperoleh perusahaan dengan tingkat penjualan yang dicapai pada periode yang sama. Rasio ini mencerminkan atau menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai setiap rupiah penjualan. Semakin besar rasionya berarti semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\textit{Gross profit margin} = \frac{\textit{laba kotor}}{\textit{penjualan bersih}} \times 100\%$$

Rasio ini merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang akan menutupi biaya-biaya tetap atau biaya operasi

lainya. Dengan pengetahuan atas rasio ini dapat mengontrol pengeluaran untuk biaya tetap atau biaya operasi sehingga rasionya semakin baik.

c) *Net Profit Margin*

Net profit margin atau margin laba bersih digunakan untuk mengukur rupiah laba bersih yang dihasilkan oleh setiap satu rupiah penjualan dan mengukur seluruh efisiensi baik produksi, administrasi, pemasaran, pendanaan, penentuan harga maupun manajemen pajak. Semakin tinggi rasionya menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu tetapi jika rasionya rendah menunjukkan penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat biaya tertentu atau biaya yang terlalu tinggi untuk tingkat penjualan tertentu atau kombinasi dari kedua hal tersebut. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{net profit margin} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{penjualan bersih}} \times 100\%$$

Rasio ini mengukur jumlah rupiah laba bersih yang dihasilkan oleh setiap satu rupiah penjualan. Semakin tinggi rasionya maka semakin baik karena menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu

d) *Return on investment*

Return on investment merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan menutup investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak atau EAT. Rasio ini dihitung dengan rumus :

$$\text{return on investment} = \frac{\text{labu bersih setelah pajak}}{\text{investasi}} \times 100\%$$

Rasio ini mengukur jumlah rupiah laba bersih (setelah pajak) yang dihasilkan oleh setiap satu rupiah investasi yang dikeluarkan. Semakin besar semakin baik.

B. *Good Corporate Governance*

1. Pengertian *Good Corporate Governance*

Istilah corporate governance telah banyak didefinisikan tetapi beberapa definisi tersebut berbeda satu sama lain bergantung kecenderungan pihak yang mendefinisikannya. Dalam buku *Good Corporate Governance* Tinjauan Etika dalam praktik bisnis Hamdani (2016:20) mendefinisikan “*corporate governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan”.

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) mendefinisikan GCG sebagai “proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham

dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak petaruh lainnya”.

Selain pemenuhan kepentingan para pemegang saham, GCG dimaksudkan untuk menjamin sustainability. Definisi ini menunjukkan bahwa corporate governance dapat berfungsi untuk membangun kepercayaan, menjalin kerja sama, dan menciptakan visi bersama antara semua pihak yang terlibat dalam perusahaan sehingga masalah keagenan dapat diantisipasi. Sedangkan the Organization of Economic Corporation and Development .Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Sebagaimana dijelaskan dalam peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 bahwa prinsip-prinsip dalam GCG harus menerapkan prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), independensi (independency), kewajaran (fairness), dan pertanggungjawaban (responsibility). Hal ini diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders).

Berikut uraian prinsip-prinsip GCG yang berlaku secara umum menurut Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 :

1. **Transparansi** Prinsip dasar transparansi menunjukkan tindakan perusahaan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh stakeholders. Transparansi (tranparency) mengandung unsur pengungkapan (discloure) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan secara mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Prinsip transparansi dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Transparansi merupakan suatu komitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi penting bagi pihak-pihak yang

berkepentingan (stakeholders) mengenai keadaan keuangan, pengelolaan dan kepemilikan perseroan secara akurat, jelas dan tepat 13 waktu. Adapun implementasi prinsip transparansi dalam praktik bisnis sebagai berikut :

- a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
 - b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi: visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat memengaruhi kondisi perusahaan.
 - c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi.
 - d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. (Hamdani, 2016 dalam buku GCG: Tinjauan Etika dalam praktik Bisnis)
2. Akuntabilitas. Prinsip dasar akuntabilitas (accountability) bagi perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas yang menjamin tersedianya mekanisme, peran tanggung jawab jajaran manajemen yang profesional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional perseroan. Implementasi prinsip akuntabilitas dalam praktik bisnis adalah:
- a. Perusahaan menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan.
 - b. Perusahaan menjamin bahwa semua organ perusahaan termasuk karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
 - c. Perusahaan menerapkan sistem pengendalian internal dan efektif dalam pengelolaan perusahaan.

- d. Perusahaan memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).
 - e. Perusahaan memiliki etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang dijalankan oleh setiap organ perusahaan mulai dari pimpinan atas sampai pada tingkat karyawan bawah. (Hamdani, 2016 dalam buku GCG: Tinjauan Etika dalam praktik Bisnis)
3. Independensi Prinsip dasar independensi (independency) dalam pelaksanaan GCG bagi perusahaan diharapkan pengelolaan dapat dilakukan secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. adapun pedoman pelaksanaan prinsip independensi di antaranya:
- a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.
 - b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain. 16 (Hamdani, 2016 dalam buku GCG: Tinjauan Etika dalam praktik Bisnis)
4. Kewajaran Prinsip dasar kewajaran dan kesetaraan (fairness) dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Prinsip kewajaran dan kesetaraan adalah prinsip yang mengandung unsur keadilan, yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk para pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor serta masyarakat luas. Terlebih keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dari tindakan kecurangan. pedoman pelaksanaan prinsip kewajaran dan kesetaraan dalam praktik bisnis yaitu
- a. Perusahaan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi
 - b. Perusahaan memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. 17
 - c. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarier dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan,

gender dan kondisi fisik.(Hamdani, 2016 dalam buku GCG: Tinjauan Etika dalam praktik Bisnis)

5. **Responsibilitas** Responsibilitas diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial.Prinsip dasar responsibilitas (responsibility), pada prinsipnya perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.Dalam hal ini tanggung jawab mencakup adanya deskripsi yang jelas tentang peranan dari semua pihak dalam mencapai tujuan bersama, termasuk memastikan dipatuhinya peraturan serta nilai-nilai sosial. Prinsip responsibilitas dalam praktik bisnis diantaranya
 - a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by-laws).
 - b. Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial di antaranya: kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan 18 terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. (Hamdani, 2016 dalam buku GCG: Tinjauan Etika dalam praktik Bisnis). Tujuan dan manfaat Good Corporate Governance Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Usaha Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, maka dapat diketahui tujuan dari penerapan prinsipprinsip GCG antara lain:
 - 1) Penerapan prinsip-prinsip GCG untuk memaksimalkan nilai BUMN agar BUMN memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional, sehingga tujuan BUMN dapat dicapai.
 - 2) Agar BUMN dalam menjalankan usahanya dapat dijalankan secara professional, transparant, efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ-organ perusahaan.
 - 3) Agar setiap keputusan yang diambil dilandasi oleh nilai moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan kepentingan-kepentingan para stakeholder (melindungi hak stakeholder).
 - 4) Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
 - 5) Meningkatkan iklim investasi nasional.

Teori Good Corporate Governance (GCG) dalam Hamdani (2016:29)

Berikut ini disajikan beberapa teori yang relevan terkait dengan praktik

GCG di Indonesia Teori corporate governance dapat diformulasikan

dalam model-model corporate governance yang bersifat mainstream

seperti masing-masing teori yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Finance Model (Agency Theory) Asumsi teori ini menyatakan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (Agency problem). Pemilik perusahaan akan memberikan kewenangan pada pengelola (manajer) untuk mengurus jalannya perusahaan seperti mengelola dana dan mengambil keputusan perusahaan lainnya untuk dan atas nama pemilik perusahaan. Dimungkinkan pengelola tidak bertindak atas kepentingan pemilik, karena adanya perbedaan kepentingan (conflict interest). Dalam teori agensi, kepemilikan saham sepenuhnya dimiliki oleh pemegang saham dan manajer (agen) diminta untuk memaksimalkan tingkat pengembalian pemegang. Dengan adanya GCG, tentunya dapat menjadi alat untuk memotivasi manajer agar mampu memaksimalkan nilai pemegang saham. Biaya keagenan (agency cost) dibagi menjadi: monitoring cost, bonding cost dan residual loss. Monitoring cost adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh principal untuk memonitor perilaku agent, yaitu untuk mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku agent. Ketika perusahaan semakin berkembang dan kepemilikan saham semakin tersebar, maka semakin besar monitoring cost yang terjadi. Bonding cost merupakan biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agent akan bertindak akan kepentingan principal. Sedangkan residual loss merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran principal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agent dan keputusan principal.
- b. Stewardship Model (Stewardship Theory) Teori stewardship diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku dan premis. Teori stewardship beranggapan bahwa manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan keinginan principal. Teori ini relatif baru sehingga kontribusi teoritisnya kurang mantap. Sebelumnya, peneliti telah mempertentangkan teori agency dan stewardship, namun gagal menguji aspek psikologis dan situasional yang dapat menjadi pondasi teori stewardship. Donaldson & Davis (1991) beranggapan bahwa teori stewardship adalah benar dan teori agency salah. Teori stewardship menggambarkan situasi dimana para manajer tidak termotivasi pada tujuan individu tetapi

lebih ditujukan pada tujuan untuk kepentingan organisasi. Beberapa modal yang dipilih oleh agent dan pricipal dalam pengambilan keputusan ada empat macam (Hamdani, 2016:34 dalam buku GCG: Tinjauan Etika dalam praktik Bisnis):

- 1) Meminimalisir biaya potensial
 - 2) Agen bertindak oportunistik
 - 3) Prinsipal bertindak oportunistik
 - 4) Memaksimalkan kinerja potensial
- c. Stakeholders Model (Stakeholders Theory) Istilah Stakeholder pertama kali diperkenalkan oleh Stanford Research Institute (SRI) pada tahun 1963. Bahwa Stakeholder merupakan kelompok maupun individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi.

Faktor-faktor yang Memengaruhi Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam pelaksanaan GCG, terdapat perbedaan pelaksanaannya di tiap Negara, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antar lain seperti kerangka hukum, maupun hal-hal yang tidak tertulis namun memiliki pengaruh luar biasa pada tingkat keberhasilan penerapan prinsip-prinsip governance yang baik. Penerapan GCG pada masing-masing Negara sangat ditentukan oleh sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya. Berkaitan dengan sistem ekonomi, GCG tidak dapat dilaksanakan secara parsial, namun harus dilakukan bersama. Perkembangan pasar modal dan sektor keuangan, terutama sektor perbankan sangat memengaruhi efektifitas GCG. Selain faktor tersebut, penerapan GCG sangat ditentukan oleh tiga pilar: negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai penggunaan produk dan jasa dunia usaha. (Hamdani, 2016, 25) Prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah:

- a. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundangundangan dan penegakan hukum secara konsisten (consistent law enforcement). Peran Negara sangat menentukan keberhasilan GCG. Oleh karenanya Negara mempunyai peran strategis dalam mendorong terciptanya pemerintah yang bersih. Negara yang tidak menyelenggarakan preinsip-prinsip good governance (GG) akan memiliki kredibilitas yang rendah korupsi yang merajalela serta tidak terciptanya kepastian hukum.
- b. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar melakukan usaha. GCG menjadi sebuah keniscayaan, mengingat kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh 23 organ-organ perusahaan (RUPS, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi) harus dilakukan dalam rangka pemenuhan hak dan tanggung jawab seluruh pemegang saham, termasuk para pemegang saham minoritas yang notabenehnya dikuasai oleh publik, atas dasar kewajiban dan kesetaraan (fairness) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.
- c. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (social control) secara objektif dan bertanggung jawab.

C. Kerangka Pikir

Kinerja keuangan merupakan hal yang penting yang harus diketahui oleh setiap perusahaan untuk menunjang tumbuh dan berkembangnya perusahaan. Kinerja keuangan dari suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan tersebut, tetapi laporan tersebut perlu dianalisa lebih lanjut dengan alat analisa keuangan. Likuiditas dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dengan analisis Solvabilitas dapat menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dan semua kewajibannya yang sudah jatuh tempo.

Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya.